



# PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat:
1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
  2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah an Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4048

3. Undang – Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178.Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)Jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 Pentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
6. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubaha beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indodesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2007 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2007.

### **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Neraca;
  - Laporan Arus Kas; dan
  - Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah

### **Pasal 2**

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

- |                |                               |                         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan  | Rp. 264.490.602.979,33        |                         |
| b. Belanja     | Rp. <u>276.627.205.061,86</u> |                         |
|                | Surplus /defisit              | Rp. (12.137.002.082,53) |
| c. Pembiayaan  |                               |                         |
| 1. Penerimaan  | Rp 54.328.790.941,13          |                         |
| 2. Pengeluaran | Rp <u>3.000.000.000,-</u>     |                         |
|                | Surplus/ Defisit              | Rp. 51.328.790.941,13   |

### **Pasal 3**

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan ralisasi pendapatan sejumlah Rp 2.047.996.278,33 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |  |
|--|--|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 262.442.606.701,00                        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp 264.490.602.979,33</u>                 |
|  | Selisih lebih / (kurang) Rp 2.047.996.278,33 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 37.011.292.081,13 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 305.877.597.142,13                         |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp 268.866.305.061,86</u>                  |
|                                       | Selisih lebih / (kurang) Rp 37.011.292.081,13 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (39.191.788.359,-) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Surplus /defisit setelah perubahan | Rp (51.328.790.441,13)                         |
| Realisasi                             | <u>Rp (12.137.002.082,53)</u>                  |
|                                       | Selisih lebih / (kurang) Rp (39.191.788.359,-) |

- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan |                            |
| Setelah Perubahan                 | Rp 54.328.790.941,-        |
| 2. Realisasi                      | <u>Rp 54.328.790.941,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang)          | Rp -                       |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah |                           |
| Perubahan                                 | Rp 3.000.000.000,-        |
| 2. Realisasi                              | <u>Rp 3.000.000.000,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang)                  | Rp 0                      |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :
- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan neto setelah |                           |
| Perubahan                           | Rp 3.000.000.000,-        |
| 2. Realisasi                        | <u>Rp 3.000.000.000,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang)            | Rp 0                      |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp 527.780.043.844,97 |
| Jumlah Kewajiban       | Rp 3.211.314.954,-    |
| b. Jumlah equitas dana | Rp 524.568.728.890,97 |

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007           | Rp 57.195.957.381,13    |
| b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi tahun 2007 | Rp 92.770.626.212,33    |
| c. Arus Kas bersih dari aktifitas aset non keuangan  | Rp (104.907.628.294,86) |
| d. Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan         | Rp (3.000.000.000,-)    |
| f. Arus Kas bersih dari aktifitas non anggaran       | Rp 72.546.414,-         |
| g. Saldo kas akhir per 31 desember tahun 2007        | Rp 42.131.501.712,60.   |

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan daerah, organisasi , pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
  - Lampiran I.4 : Daftar Realisasai penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.
- e. Lampiran V : Laporan Keuangan PDAM Kab. Boalemo.

## **Pasal 8**

Bupati Boalemo menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 9**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 25 September 2008

**BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 25 September 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**OLIS MONOARFA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR 4